



“Kabur Aja Dulu”: Kekecewaan Generasi Muda Indonesia Terhadap Tekanan Situasi Dalam Negeri dan Upaya Transformasi Diri Sebagai Gerakan Perubahan

Natalius Andriyanto*

Program Studi SI Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Indonesia

Article Info

Keywords:
authorities,
intellect,
transformation,
welfare issues,
young generation

A B S T R A C T

“Kabur Aja Dulu”: The Indonesian Young Generation's Disillusionment with the Pressures of the Domestic Situation and Efforts to Transform Themselves as a Movement for Change. This paper focused on the phenomenon of the hashtag #KaburAjaDulu (“Just Escape First”), which has gone viral among Indonesian society, particularly among the younger generation. The hashtag has become a hot topic since early 2025, emerging as a form of unrest and concern regarding the current state of Indonesia, which is perceived as increasingly unfavorable. Contributing factors include unresolved social inequality, controversial policies driven by vested interests, and a government that tends to suppress criticism. These issues significantly impact the life development and overall well-being of young people. This writing employed a qualitative approach: analyzing the #KaburAjaDulu trend and further contextualizing it through a literature review of philosophical perspectives on human nature and the psychological characteristics of youth. The key finding of this paper was that if young people are considered the backbone of national development, the state must ensure their welfare and support the cultivation of their potential. Only through such support can youth thrive optimally during this critical phase of life. However, the chaotic socio-political conditions have driven many young individuals to seek opportunities abroad, believing they can achieve better personal and professional development outside the country. Thus, meaningful change requires a transformation of the self, particularly a transformation in consciousness and mentality, in accordance with the essence of being human. This inner transformation can serve as a foundation for broader structural and situational change beyond the individual.

© 2023 JPV: Jurnal Pengabdian Vokasi Universitas Diponegoro.

* Corresponding author:

E-mail addresses: andrechs148@gmail.com).

Pendahuluan

Tagar #KaburAjaDulu menjadi topik yang cukup hangat sejak awal tahun 2025. Tagar ini menyimpan makna yang cukup kompleks yaitu permasalahan rakyat Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, yang tampaknya sudah muak melihat keadaan Indonesia yang penuh kecarut-marutan akibat situasi dan kondisi ekonomi yang tidak mendukung kelayakan hidup rakyat Indonesia (Aji, 2025). Keadaan rakyat yang harus bersusah payah dalam mencari uang hanya untuk sekadar makan dan bertahan hidup sementara para pejabat publik dan elite politik dengan leluasa menambah tumpukan kekayaan mereka dengan bermodalkan kekuasaan dan taktik “*kong kali kong*” antar pemegang kekuasaan. Rakyat hanya menjadi penonton pasif atas kebijakan-kebijakan penguasa yang cenderung mematikan produktivitas dan kreativitas kerja rakyat. Jika kita melihat para kaum muda Indonesia, terutama mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, turun ke jalan melakukan aksi protes di depan berbagai kantor pemerintahan, berarti kaum muda ini merasakan adanya ketidakberesan yang terjadi dalam sistem dan kebijakan politik yang diterapkan oleh para penguasa dan kaum elite politik. Namun, yang terjadi adalah bahwa suara dan aspirasi kaum muda Indonesia terkadang tidak dihiraukan oleh para pemegang kekuasaan. Alih-alih mendengarkan kritikan kaum muda yang mewakili rintihan penderitaan rakyat, para penguasa lebih sibuk pada kelanggengan kekuasaan dan menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya (Ida, 2010).

Jika fenomena ini tidak ditanggapi dan disikapi dengan serius, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi era kecemasan besar di dalam negeri. Alih-alih mewujudkan Indonesia Emas, yang ada justru Indonesia Cemas. Kebijakan-kebijakan kontroversial yang terkesan berat sebelah dan para pemangku jabatan yang anti terhadap kritikan memicu terjadinya kemuakan kaum muda Indonesia terhadap negeri sendiri. Identitas mereka sebagai bagian dari negara Indonesia seakan dibuat rancu oleh situasi dan kondisi negara yang tidak mendukung pengembangan potensi kerja, bakat, dan kreativitas mereka. Alih-alih mereka mendapat bimbingan dan apresiasi, yang ada justru perlakuan otoritarian dan diskriminasi terhadap potensi dan keahlian dakan diri kaum muda (Kusbiantoro, 2023). Kita mesti tahu bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang aktif dan energik. Tetapi, lama kelamaan mereka sadar bahwa mereka menguras energi untuk harapan akan perubahan dan perbaikan kondisi negara yang ujung-ujungnya sia-sia. Selama para pejabat bermental angkuh dan korup masih menguasai negeri ini, maka mustahil perubahan dan kemajuan dapat terwujud di negeri tercinta ini (Ida, 2010).

Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan kualitatif: studi atas

fenomena trend #KaburAjaDulu yang kemudian dilihat lagi melalui studi literatur mengenai gagasan-gagasan filsafat tentang manusia dan psikologis usia generasi muda. Metode kualitatif ini kemudian menghasilkan alur penulisan yang membahas tentang fase masa muda secara psikologis dan segala problematikanya, pengaruh sikap dan kebijakan pemerintah terhadap hidup dan perkembangan mereka, fenomena ‘kabur aja dulu’ sebagai pengingat bagi bangsa, serta menghasilkan suatu solusi yang sederhana namun dapat berdampak besar dan luas seperti upaya transformasi diri; transformasi terhadap kesadaran dan mentalitas manusia sebagaimana kodratnya sebagai manusia melalui penegasan akan semangat dan cita-cita dari gagasan-gagasan filsafat era Pencerahan. Sehingga, diharapkan bahwa transformasi diri ini dapat menjadi bekal untuk mengupayakan perubahan situasi dan keadaan di luar diri ke arah yang lebih baik.

Hasil dan Pembahasan

1. Fase masa muda, problematika produktivitas, dan kesejahteraan hidup generasi muda

Dalam perspektif psikologi, fase masa muda adalah mereka yang berada dalam rentang usia antara 18 hingga 22 tahun ke atas. Mereka akan berada di fase ini setelah melalui masa peremajaan (*adolescence*) yang berada pada rentang usia antara 13 hingga 17 tahun. Tahap perkembangan yang terjadi dalam kedua tahap ini adalah penemuan identitas (positif) versus rancu identitas (negatif) (Kusbiantoro, 2023). Dalam tahap peremajaan (*adolencence*), mereka menemukan identitas dalam dirinya melalui pengenalan akan keberadaan diri di dalam suatu negara, lingkungan sosial, dan budaya sekitarnya. Pengembangan moral dan etika di lingkungannya pun berperan dalam membentuk identitas dirinya. Jika pengembangan itu didampingi oleh orang dewasa yang berkompeten (atau setidaknya, orang tua sebagai ‘guru’ pertama di dalam keluarga), maka mereka akan memiliki jati diri yang mantap seiring penguatan identitas diri mereka melalui proses pembelajaran yang mereka terima (Centry & Campbell, 2002). Jika kita berbicara dalam konteks Indonesia, mereka ini berada dalam tahap pencarian, penemuan, dan penguatan identitas “keindonesiaaan” dalam diri mereka. Identitas keindonesiaan ini tidak hanya sebatas pada kartu tanda penduduk (KTP) saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi Indonesia secara menyeluruh. Jika bisa, mereka akan siap sedia di fase masa muda menuju identitas yang lebih transendental; melampaui kesadaran akan identitas dirinya yang sudah terbentuk pada fase sebelumnya (Kusbiantoro, 2023; Riyanto et al., 2025).

Dalam rentang usia ini, kaum generasi muda mengalami perkembangan potensi produktivitas yang cukup pesat. Mereka dapat memikirkan sesuatu yang abstrak dan idealis, seperti rencana karier, kesuksesan, kesejahteraan, dan masa depan hidup yang akan datang. Mereka ini juga sudah dapat melepaskan diri

dari ikatan orang tua dan membentuk kehidupan sosial yang baru entah bersama teman-teman sebaya maupun bersama masyarakat lainnya. Dalam hal ini, kehidupan bersosial mereka diperluas dari sebatas keintiman keluarga ke lingkungan masyarakat yang lebih kompleks (Ajhuri, 2019). Jika dilibatkan dalam kegiatan sosial dan pendapat mereka mengenai penyelesaian permasalahan sosial, mereka ini dapat diandalkan karena usia yang sudah cukup mumpuni untuk terjun ke dalam kompleksitas lingkungan masyarakat setidaknya melalui lingkungan masyarakat sekitar mereka (Jost & Sidanius, 2004). Melalui pendampingan, pendidikan, dan pembelajaran yang diperoleh, maka mereka dapat menjadi pribadi yang matang, altruist, dan punya kepekaan terhadap perkembangan dan permasalahan yang ada di sekitar mereka (Kusbiantoro, 2023). Ide mereka tentang kelayakan dan kesejahteraan hidup semakin matang sehingga mereka dapat bersiap meniti karier demi kehidupan mereka dan utilitas mereka dalam lingkungan masyarakat.

Berbicara tentang kondisi dan permasalahan yang melanda Indonesia di masa sekarang ini, generasi muda dalam rentang usia ini justru menjadi kaum yang banyak menghadapi permasalahan dalam kelayakan hidup dan utilitas sosial mereka. Sejak pandemi COVID-19, krisis lapangan pekerjaan sudah mulai terjadi akibat banyaknya usaha-usaha yang kebanyakan memperkerjakan kaum muda (seperti pada sektor transportasi, hotel, restoran, kesenian, dan layanan rekreasi) ditutup karena pengaruh pandemi tersebut. Sejak saat itu, rasio pengangguran kaum muda Indonesia berkisar 21% ke atas (tertinggi kedua se-Asia Tenggara setelah Brunei Darussalam) (Rokhim et al., 2024). Upah pekerjaan yang relatif kecil menjadi problem bagi kelayakan hidup generasi muda Indonesia. Produktivitas mereka seolah-olah hanya mendapat apresiasi kecil sementara mereka bekerja keras dan total tidak hanya demi kesejahteraan hidup mereka, tetapi juga utilitas hidup mereka dalam kehidupan sosial masyarakat (agar tidak dianggap ‘beban’ dalam lingkungan masyarakat mereka) (Zoraya & Wulandari, 2020). Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan di berbagai daerah menjadi persoalan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi generasi muda Indonesia masih luput dari perhatian para penguasa (Rokhim et al., 2024). Ada maksud terselubung mengapa persoalan pekerjaan dan problem pengembangan potensi dan kreativitas generasi muda Indonesia dibarkan terbengkalai tanpa solusi dan upaya pergerakan yang jelas. Negara kita ini tampaknya ‘disetel’ hanya untuk keuntungan dan kepentingan para elit dan golongan tertentu. Jabatan politik hanya sebagai sarana aktualisasi diri bagi mereka yang menjabatnya, bukan sebagai suatu pengabdian bagi pelayanan hidup bermasyarakat (*yang penting aku (pejabat) naik (terlihat keren) dulu, yang lain itu belakangan*) (Linrung, 2014). Akibatnya, hak hidup dan

kesejahteraan rakyat dikorbankan demi akutalisasi diri dan kenyamanan hidup para pemangku jabatan. Generasi muda Indonesia, seperti yang kita lihat, diberikan pendidikan yang sesungguhnya tidak mendukung pengembangan diri dan potensialitas akal budi dan nurani mereka sebagai manusia. Sebab, pendidikan ternyata menjadi ladang bisnis dan alat “*kong kali kong*” antara guru dan pihak penguasa. Sejak masa Orde Baru, pendidikan generasi muda cenderung mengarah ke otoritarian (tunduk pada kemauan penguasa). Ide kritis dan kreativitas generasi muda seolah-olah ‘dimatikan’ melalui pemaksaan kepatuhan terhadap otoritas dunia pendidikan. Akal budi mereka tidak berkembang di dalam dirinya karena sejak dalam bangku pendidikan sudah disetel untuk mengikuti kemauan para pemangku kekuasaan (Susetyo, 2013). Apa akibatnya? Generasi muda ini tidak berkembang di dalam dirinya, tetapi berkembang melalui kekakuan otoritas para penguasa dan pengatur sistem pendidikan. Pengetahuan yang disajikan tidak sungguh-sungguh menjadi makan jiwa bagi generasi muda, tetapi hanya sebagai alat propaganda untuk menjebak agar generasi muda pun harus terlibat dalam proses aktualisasi diri dan kenyamanan hidup para penguasa (Fromm, 2020). Pengaruhnya adalah bahwa pendidikan di negeri ini tidak mengarah pada kebebasan dan peningkatan taraf pikir generasi muda, tetapi hanya sebatas syarat agar dapat menggeluti dunia pekerjaan yang layak. Kebanyakan, pekerjaan-pekerjaan dengan gaji yang cukup mengisyaratkan ijazah sebagai syarat administrasi masuknya. Sehingga, pemahaman berpendidikan tidak lagi demi pembebasan pribadi dari ‘belenggu’ kebodohan, tetapi lebih dipahami sebagai syarat ‘mutlak’ untuk masuk dalam kelayakan dan kemapanan dunia kerja yang sudah disistematisasi sedemikian rupa oleh para pengatur kebijakan. Maka, apapun akan mereka kerjakan dan lakukan demi kelayakan hidup mereka di masa depan sekalipun harus bekerja tidak sesuai dengan potensi diri mereka (karena terpaksa harus mengikuti sistem-sistem klasifikasi yang menekang pengembangan kreativitas dan potensi dalam diri mereka).

Tanpa sadar, fenomenologi umum ini ternyata membuat generasi muda kita jatuh ke dalam kerancuan identitas diri dan utilitas diri mereka. Mereka tahu apa yang mereka kerjakan, mereka tahu apa yang mereka kejar, dan mereka sadar bahwa mereka harus bersekolah dan bekerja untuk hidup yang layak. Tetapi, sayangnya mereka tidak dapat memaknai semua yang mereka kerjakan itu dalam pengembangan diri mereka. Mereka tidak bebas dalam mengembangkan diri mereka karena mengikuti sistem dan keadaan yang sudah ditetapkan oleh para pengatur kebijakan. Mereka tidak berpendirian kuat karena terombang-ambing oleh sistem dan keadaan yang mudah berubah-ubah (Kusbiantoro, 2023). Pendidikan yang picik, sempit, dan otoriter sudah menjadi santapan mereka semasa menempuh dunia pendidikan. Pendidikan di negeri ini hanya sebatas

ungkapan-ungkapan filosofis seperti: “*anda benar dipuji, anda salah dicaci*”, “*kalau kita sama, kita temenan, tapi kalau kita beda, kita musuh*”, dan lain sebagainya (Susetyo, 2013). Kesempitan dan kepicikan ini berpengaruh pada penanaman etika yang hanya sebatas etika subjektivisme dan emotivisme (berdasarkan emosinya si pembuat norma dan etika). Jika tindakannya sesuai, maka akan mendapat apresiasi (pujian), tetapi jika kurang atau tidak sesuai maka akan mendapat cemoohan (disoraki ‘*huuu*’ oleh orang banyak di sekitarnya; atau yang lebih buruk, dikucilkan dari lingkungan masyarakat) (Gensler et al., 2004). Pemaksaan etika seperti ini berpotensi mematikan kebebasan generasi muda dalam mengembangkan potensi diri dan kreativitasnya. Mirisnya, hal ini dibiarkan saja dan bahkan dipelihara sampai turun temurun. Kita dapat mengatakan hal ini sebagai kolonisasi kebiasaan (Riyanto, 2025). Apa yang menjadi kebiasaan akan dianggap sebagai suatu kebenaran etis, sehingga hal ini berpengaruh pada pengembangan kekritisan akal budi bagi siapa saja yang terdampak pada kebenaran etis itu (Gensler et al., 2004; Riyanto, 2025). Karena kebebasan mengembangkan diri yang dikekang inilah generasi muda cenderung melalui fase masa mudanya secara tidak ideal. Alih-alih membawa mereka pada kebebasan dan kemandirian berpikir kritis, yang ada malah menyeret mereka untuk mengikuti proyek aktualisasi diri para penguasa. Dalam analogi pertumbuhan pohon, kualitas pohon dan buah sangat bergantung pada bagaimana cara kita menanam, merawat, dan memupuk pohon itu. Jika generasi muda dari kecil sudah dididik dan dibesarkan melalui cara yang keliru dan salah, maka mereka pun akan rentan mengalami masalah pada saat memasuki dunia kerja. Jika hal ini luput dari kesadaran masyarakat dan perhatian para penguasa, maka akan sangat sulit (bahkan hanya sebatas mimpi) jika menginginkan adanya kemajuan di negeri Indonesia ini.

2. Kebijakan kontroversial, penguasa yang anti-kritik, dan pengabaian suara-suara kaum muda

Sejak era Orde Baru, negara kita ini sudah diwarnai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontroversial. Contoh saja, di dalam dunia pendidikan yang menjadi makanan utama dalam pengembangan generasi muda, pernah muncul kontroversi terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) terutama tentang persoalan pendidikan agama peserta didik yang dianjurkan dilayani oleh guru yang seagama (diatur dalam RUU Sisdiknas bab V pasal 12 ayat 1a dan juga UU No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 2). Kontroversinya adalah seolah-olah pendidikan agama yang selama ini menjadi sarana pendalaman iman generasi muda dimasukkan dalam formalisasi sistem pendidikan yang diatur oleh pemerintah. Artinya, iman dan agama dimainkan perannya dalam alur politik pemerintahan sehingga

muncullah suatu istilah yang dikenal sebagai ‘politisasi agama’ (Susetyo, 2013). Meskipun kontroversi ini sudah lama lewat, tetapi pada masa kini dapat dirasakan dampaknya, seperti kebencian dan kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama hingga persaingan politik yang melibatkan agama-agama (politik identitas; jalan menuju keselamatan ‘dibelokkan’ menjadi jalan menuju tampuk kekuasaan politis). Tidak hanya pendidikan generasi muda, bahkan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan rakyat dipolitisasi. Banyaknya tangan-tangan kepentingan (yang kemudian berkembang menjadi sekumpulan ‘mafia’) memainkan peran politisasinya demi menambah pundi-pundi para elit semata. Sehingga, hasilnya adalah bahwa keadaan *societas* masyarakat masih berada dalam ketimpangan dan kesenjangan sosial yang luar biasa lebarnya (antara kaya dan miskin sangat sulit untuk menjangkau satu sama lain) (Ida, 2010; Riyanto, 2025). Banyak orang berlomba-lomba mengejar kemewahan dan kemapanan hidup melalui jalur titel jabatan politik (menghalalkan segala cara demi memperoleh kekuasaan). Sehingga lihatlah, ketika sudah memperoleh jabatan seolah-olah ‘amnesia’ terhadap apa yang ia janjikan kepada rakyat yang memercayakannya. Alih-alih melayani rakyat, yang dilakukan justru menggeser makna hukum yang seharusnya sebagai pelindung masyarakat malah menjadi hukum sebagai alat pemberdayaan rakyat demi kepuasan aktualisasi diri para penguasa (Linrung, 2014).

Pada awal tahun 2025, negara kita dihebohkan dengan fenomena tagar #KaburAjaDulu yang digagas oleh kebanyakan generasi muda. Kita dapat membaca bahwa tagar ini muncul sebagai ungkapan kekhawatiran terhadap kondisi negara yang semakin hari semakin tidak baik-baik saja, mulai dari mahalnya biaya pendidikan di tanah air, minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, dan rendahnya upah bagi para pekerja di setiap bulannya. Hal ini dapat dikatakan sebagai efek dari berbagai kebijakan pemerintah yang cenderung tidak memihak pada masyarakat (Zaenuddin, 2025). Tentunya ini akan sangat berpengaruh pada generasi muda. Sebab, mereka inilah yang mulai menjajaki dunia pendidikan dan pekerjaan untuk kelayakan hidup mereka. Generasi muda selama ini terus dibangga-banggakan sebagai generasi penerus bangsa. Memang benar adanya karena mereka lah yang kemudian meneruskan pekerjaan, perjuangan, dan karya-karya kita di dunia nantinya. Mereka yang sekarang ini masih sangat produktif inilah yang akan membawa pengaruh besar bagi pembangunan bangsa di masa depan. Mereka mempunyai kekuatan dan dedikasi yang sudah cukup matang serta sikap altruisme yang sudah cukup bagus untuk menjadi kekuatan pembangunan bangsa dan negara baik untuk masa kini maupun untuk masa mendatang (Kusbiantoro, 2023; Rokhim et al., 2024). Namun, pada kenyataannya, potensialitas generasi muda terpaksa berhenti berkembang karena keadaan di

dalam negeri yang tidak mendukung mereka. Mereka terpaksa menjadi pengangguran karena keadaan krisis lapangan pekerjaan dan tekanan politik, ekonomi, dan sosial, sehingga kelayakan hidup mereka sangat sulit untuk terjamin. Maka, ada kalanya mungkin lebih baik ketika mereka mengincar luar negeri sebagai destinasi pengembangan diri dan suaka pekerjaan demi meningkatkan taraf dan kualitas hidup. Sebab, bagi mereka, mereka akan lebih berkembang dan potensialitasnya terjamin jika mereka berada di luar negeri ketimbang bekerja di bawah tekanan dan kekacau-balauan keadaan dalam negeri (Aji, 2025).

Kita pun menyaksikan bagaimana aspirasi-aspirasi generasi muda (yang bisa jadi mewakili jeritan hati rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang menindas rakyat) kerap diabaikan dan tidak dipedulikan oleh pihak pengusa. Bahkan, demi kelanggengan kekuasaan mereka, mereka memasang alat tempur untuk meredam dan menahan suara-suara dan jeritan rakyat yang masuk seperti memasang senjata bersenjata yang akan bertindak secara brutal untuk menghalangi generasi muda menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Memang, selama ini masih belum ada, bahkan tidak ada, ruang dialog antara penguasa dan rakyat sipil. Hal ini juga ada sebagai akibat dari proses pendidikan generasi muda yang selama ini tidak dialogal, tetapi cenderung otoritarian (Susetyo, 2013). Maka, mau tidak mau, kekuatan demonstrasi ke jalan dalam jumlah besar diambil sebagai cara ampuh agar aspirasi dan pendapat generasi muda serta jeritan kaum marjinal dapat tergaungkan sampai ke kantornya para penguasa. Alinea IV dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dengan jelas menunjukkan bahwa negara Indonesia ini haruslah menghormati kedaulatan rakyat. Dengan demikian, perlulah penghormatan terhadap hak-hak hidup dan hak asasi manusia mengingat bahwa negara ini menganut sistem demokrasi karena alasan penghargaan terhadap kodrat kemanusiaan setiap warga negaranya (Yusdiyanto, 2016). Jika pada gilirannya rakyat dan generasi muda beraspirasi dan menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah, maka itu sudah menjadi hal wajar dan perlu dihargai karena rakyat juga memiliki hak dan suaranya untuk berpendapat terhadap kondisi negara yang dialaminya. Siapa pun yang menjadi *public figure*, memang harus siap untuk dikritik. Orang yang akal budinya baik dan lepas-bebas dapat mendengarkan kritik dengan keterbukaan hati tanpa memasang gangguan apapun terhadapnya. Kritik dapat menjadi sarana agar manusia dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan berakal budi yang lepas-bebas (Garvey, 2010; Riyanto et al., 2025). Namun, pada kenyataannya, para penguasa menutup pintu hati mereka terhadap kritik dan suara-suara rakyat karena akal budinya masih terikat pada ambisi pengejaran keuntungan pribadi dan kelanggengan kekuasaan. Mereka bisa saja bertindak

kontroversial dengan dalih kepentingan negara yang sebenarnya hanya untuk keuntungan segelintir orang tertentu. Politik yang berperspektif pada akal budi yang tidak sehat ini kemudian berdampak pada kebijakan kontroversial yang merugikan dan menyengsarakan rakyat dan generasi muda. Menutup diri terhadap kritik dan jeritan-jeritan rakyat dan generasi muda sama saja dengan membawa negara ke arah kehancuran. Jika rakyat dan generasi muda sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah maka ini menjadi pertanda bahwa era kekacauan (*chaos age*) sebentar lagi akan dimulai dan melanda negeri tercinta ini (Linrung, 2014).

Fenomena anti-kritik para aktor politik ini kemudian membawa bahaya serius bagi demokrasi bangsa dan negara. Kebebasan warga negara dalam mengembangkan kekritisan akal budi dan hati nuraninya terhadap keadaan bangsa dan negara semakin hari semakin terancam. Baru-baru ini, kita dihebohkan dengan berita mengenai kantor media Tempo yang mendapat teror berupa kiriman kepala babi. Teror kepala babi tersebut diketahui menyasar ke salah satu host program siaran Bocor Alus Politik (BAP). Teror ini bukan hanya mengancam kebebasan pers, tetapi juga mengancam kemerdekaan dan kebebasan hak manusia (warga negara) dalam mengembangkan dan mengekspresikan ketajaman akal budinya (n.n., 2025). Mengingat bahwa kondisi negara kita yang sejak awal 2025 sudah diwarnai oleh berbagai kekacauan yang mengancam kesejahteraan dan keadilan bersama, maka rakyat dan generasi muda pun tidak tinggal diam terhadap situasi ini. Berbagai cara dilakukan agar setidaknya para penguasa membuka mata mereka terhadap keadaan dan membuka telinga mereka terhadap jeritan rakyat yang tertindas. Namun, adanya teror ini tidak hanya menjadi luka bagi kebebasan pers dalam penyajian berita yang aktual dan berkualitas, tetapi lebih-lebih kepada penutupan ruang ekspresi bagi mereka yang ingin menyuarakan pendapat dan ketajaman akal budinya terhadap keadaan bangsa dan negara di saat ini (Riyanto et al., 2025). Pertanyaan yang perlu direfleksikan: apakah menutup diri terhadap kritik saja belum cukup sehingga ruang berekspresi akal budi dan jeritan hati manusia pun ditutup dengan segala macam cara dan ancaman?

Rene Descartes, seorang filsuf Perancis terkemuka pada masa Renaisans, menegaskan bahwa kegiatan berpikir manusia adalah bagian dari keberadaan manusia. Hal ini tampak dalam slogan terkenalnya: “*Cogito Ergo Sum*” (Ing: *I think, therefore I am*) yang berarti: “*saya berpikir, makanya saya ada*”. Berpikir berarti masuk ke dalam kesadaran dirinya sebagai manusia yang berada (Descartes, 2003). Rakyat dan generasi muda adalah manusia-manusia yang berpikir; yang masuk ke dalam kesadaran akan eksistensi diri sebagai warga negara Indonesia. Maka, sudah menjadi hal yang wajar jika mereka bersuara dan menginginkan suatu perubahan demi memulihkan keadaan negara dan keadilan sosial. Namun, sekali

lagi, hal ini terhalang oleh sikap anti kritik para penguasa yang lebih memikirkan keuntungan pribadi dan segelintir elit tertentu daripada kesejahteraan bersama yang adil dan merata (Ida, 2010; Linrung, 2014). Belum cukup menutup diri dari suara dan jeritan masyarakat, ruangan kebebasan berpikir di kalangan rakyat dan generasi muda serta kesempatan eksistensi akal budi pun ditutup melalui berbagai macam cara mulai dari teror yang mengancam kebebasan pers hingga penyikiran terhadap karya-karya seni rakyat yang menginterpretasikan keresahan rakyat terhadap kondisi dan situasi bangsa dan negara saat ini.

3. Kabur ke luar negeri: sebagai solusi sekaligus alarm keras

Tagar #KaburAjaDulu muncul dan bergaung pada awal 2025 di kalangan generasi muda. Tagar tersebut bisa dikatakan sebagai ajakan bagi generasi muda untuk mencari pengalaman di luar negeri sekaligus bekerja di luar negeri demi taraf hidup yang lebih baik. Tidak hanya soal taraf hidup, ajakan ini juga bermaksud untuk menyadarkan kaum muda agar tidak menjadi budak atas sistem oligarki kapitalis yang sudah lama menjalankan perannya di Indonesia sebagai penuhnya atas kepentingan tertentu (yang jelas mengesampingkan kepentingan bersama bagi seluruh rakyat) (Aji, 2025). Sejarah telah mencatatkan bahwa bagaimana perbudakan menggerus kodrat hidup manusia secara kejam. Sebab, melalui perbudakan, kodrat manusia dibuat rendah setara hewan (Gombrich, 2020). Budak sejatinya bekerja tidak untuk kesejahteraan dan kelayakan taraf hidupnya, tetapi yang lebih utama adalah kehendak tuan yang telah mempekerjakannya. Padahal, sebagai manusia yang punya hak untuk hidup layak, ia sendiri sangat membutuhkan apa yang ia produksi (apa yang menjadi hasil kerjanya) (Garvey, 2010). Manusia perlu untuk sadar akan kodrat individunya yang khas dan unik yang harus dihargai sebagaimana mestinya. Sejak era Pencerahan, manusia dituntut agar memiliki sikap pribadi yang lepas-bebas (dalam artian, tidak menjadi budak atas apapun). Manusia harus dapat hidup dan berkembang dalam dirinya sendiri dan bukan dalam pengekangan eksternal apapun yang menghalangi perkembangan hidupnya (Fromm, 2020). Melalui pemahaman ini, mungkin ada lebih baiknya kabur daripada terus-menerus menjadi budak bagi kepuasan para penguasa oligarkis dan kapitalis yang terus beraktualisasi diri dalam peranan politik di Indonesia.

Generasi muda punya potensi yang cukup mumpuni jika dijadikan sebagai agen pembangunan dan perubahan bangsa (Rokhim et al., 2024). Sebagai manusia dengan kodrat dan haknya akan kehidupan yang layak, generasi muda pun butuh diperhatikan keterjaminan hidupnya mulai dari kualitas pendidikan, ketersediaan lapangan kerja dan keyakinan upah demi kesejahteraan ekonomis mereka, hingga keterlibatan mereka dalam pembangunan masyarakat. Mereka

akan benar-benar berkembang jika negara memperhatikan dan mendukung hal-hal tersebut bagi mereka (Priambodo et al., 2025). Namun, karena pada kenyataannya negara kita masih dikuasai oleh kelompok-kelompok kepentingan, maka sangat sulit bagi kaum muda untuk berkembang dan mendapatkan keterjaminan dalam kesejahteraan hidup mereka. Mereka lambat laun mulai sadar bahwa mereka telah diperbudak oleh kepentingan-kepentingan elit tertentu yang tentunya menghambat perkembangan dan kemajuan hidup mereka. Apresiasi dan perhatian terhadap mereka di dalam negeri sangat minim sehingga pergi ke luar negeri bagi mereka adalah jalan keluar untuk mengembangkan hidup secara lebih baik karena mereka menganggap bahwa mereka akan lebih terjamin ketika bekerja di luar negeri ketimbang di negeri sendiri (sebagaimana dalam bunyi pepatah “*hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri*”) (Aji, 2025).

Jika fenomena ini tidak disikapi dengan serius, maka lambat laun bangsa dan negara akan mengalami krisis kaum muda dan tentunya akan membawa dampak bagi pembangunan di Indonesia (Rokhim et al., 2024). Fenomena kabur ke luar negeri di kalangan generasi muda ini memang memunculkan persoalan antara semangat nasionalisme dan persoalan realistik yang mengguncang kehidupan kaum muda itu sendiri (Priambodo et al., 2025). Sejak dalam tahap pendidikan usia dini, rakyat dan generasi muda sudah diajarkan mengenai rasa cinta dan kesetiaan terhadap tanah air, sekalipun pada kenyataannya tanah air belum tentu memiliki rasa cinta terhadap warga negaranya. Negara kita ini masih didominasi oleh kepentingan-kepentingan para elit politik. Masing-masing kelompok kepentingan berusaha sedemikian rupa agar mereka dapat mencapai aktualisasi dirinya sekalipun harus menjadikan warga negara sebagai alat pengaktualisasi diri mereka (Linrung, 2014). Tentunya ini menjadi pengingat keras bagi kita semua; ketika kabur ke luar negeri dipilih menjadi solusi, maka apa gunanya menggaung-gaungkan propaganda nasionalisme. Sementara, fenomena politik kepentingan dan kesenjangan sosial dengan jelas menunjukkan bagaimana semangat nasionalisme rakyat dan generasi muda yang lambat laun tergerus oleh ambisi egoisme segelintir orang tertentu.

4. Transformasi diri sebagai upaya perubahan dalam memulihkan keadaan di dalam negeri

Jika kita hendak menginginkan adanya perubahan dalam rangka pemulihan keadaan, maka cara yang cukup sederhana namun bisa berdampak luas adalah mentransformasi diri, terutama soal kesadaran diri sebagai manusia dan perubahan mentalitas. Pertama, manusia adalah satu kesatuan antara tubuh, jiwa, pikiran, dan akal budi. Manusia adalah makhluk yang menyejarah dan memiliki kronologi pengalaman dalam hidupnya. Setiap manusia diciptakan dalam rupa yang sama dan kodrat kemanusiaan yang sama; sama-sama lahir dari rahim seorang ibu (Bakker, 2000;

Fromm, 2020). Memang, seperti yang dikatakan oleh John Locke bahwa manusia pada awal kelahirannya tampak seperti kertas kosong (konsep *tabula rasa*), namun lama kelamaan ia diisi oleh pengalaman, didikan, dan kondisi situasi yang kemudian mulai mengisi kekosongan pikiran itu. Melalui pengalaman didikanlah, seperti yang diungkapkan oleh Hsun Tzu, akal budi manusia mulai berkembang dari yang awalnya dituntun oleh orang lain menjadi kehendak bebas untuk mengembangkannya secara otonom (Bagus, 2005; Garvey, 2010). Melalui kesadaran akan pengalaman inilah, manusia (warga negara) dapat menilai kecarut-marutan yang saat ini terjadi di Indonesia melalui perspektif perjalanan panjang bangsa dan negara Indonesia terutama pada era penjajahan hingga Orde Baru yang ‘membuat mati’ kebebasan rakyat dalam berpikir dan menyuarakan pikiran dan jeritan hati nuraninya terhadap situasi yang menyajikan berbagai penindasan dalam segala macam cara entah itu melalui kebijakan yang berat sebelah hingga dunia kerja yang keadaannya bak neraka karena dominasi peran para elit kapitalis (Saeng, 2012; Susetyo, 2013; Riyanto et al., 2025). Maka, menuntut perubahan lewat suara saja tidaklah cukup. Kita sendirilah yang harus bergerak bertransformasi diri dengan meningkatkan pemahaman akan kesadaran diri kita sebagai manusia yang sama-sama memiliki kodrat dan akal budi yang sama sebagai manusia.

Kedua, kita tidak dapat terus-terusan mempertahankan mentalitas kini yang masih jauh dari kemajuan. Meskipun memang kebebasan berpikir dan berekspresi akal budi kita dibuat mandek oleh sistem pendidikan yang sarat politisasi (sebagai akibat dari warisan penjajahan kolonial yang masih membekas hingga sekarang), tetapi setidaknya kita berupaya untuk bangkit dan membebaskan keterbelengguan mental kita. Sebagaimana Erich Fromm menggaungkan agar manusia harus dapat menggunakan akal budinya secara mandiri dalam mengembangkan kualitas hidupnya, seorang filsuf pendidikan, Paulo Freire, menganjurkan agar manusia memperoleh pendidikan yang membebaskan, di mana melalui pendidikan manusia dapat menjadi tuan atas pemikirannya sendiri (Fromm, 2020; Susetyo, 2013). Maka, memang ada baiknya kita menghidupkan lagi gagasan mentalitas yang diharapkan sejak era Pencerahan bahwa manusia harus dapat menjadi tuan atas pengembangan akal budinya sendiri secara mandiri dan bukan oleh setiran kehendak eksternal seperti otoritas politik dan kepentingan kapitalis. Kitalah yang harus memegang kuasa atas akal budi dan pikiran kita, bukan orang lain yang mengendalikan kita demi kepuasan pribadi dan sekadar aktualisasi dirinya saja.

Ketiga, bagi para *public figure* dan pemegang jabatan politik, yang perlu ditransformasi adalah mentransformasi motivasi kepemimpinan. Motivasi kepemimpinan ini hendaknya ditransformasi dari motivasi egoistik menuju ke motivasi altruistik. Motivasi altruistik perlu ditanam, dirawat, dan ditopang

dengan semangat kepercayaan diri, orientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi, dan keberanian untuk mengambil resiko dalam memperjuangkannya (Kusbiantoro, 2023). Perlu diingat bahwa Tuhan telah menciptakan bumi yang indah dan kaya ini demi kesejahteraan seluruh manusia yang menghuni bumi, bukan demi kepuasan segelintir manusia tertentu saja. Negara, menurut Plato, idealnya berdiri sebagai komunitas lingkup semesta kecil untuk mengusahakan pelayanan akan kebutuhan dasar manusia dalam rangka membangun dan memperkuat kualitas kemanusiaan. Jabatan politik hendaknya dimaknai dan diemban sebagai tugas pengabdian dan sarana agar dapat mewujudkan nilai kemanusiaan di dalam negara, bukan sebagai kekuasaan yang dikejar sebagai sara menumpuk keuntungan pribadi saja (Linrung, 2014). Hal ini hanya akan terjadi jika para *public figure* dan pejabat politik membebaskan akal budi mereka dari belenggu ambisi dan kehausan akan kepentingan yang menghambat mereka dalam memiliki kemampuan empati terhadap keadaan rakyat dan generasi muda di dalam negeri. Tentunya, pemerintahan akan berjalan bersih jika para pejabat politiknya memimpin dengan akal budi yang bersih pula (Riyanto et al., 2025).

Kesimpulan

Keadaan di dalam negeri yang sudah diwarnai kekacauan sejak awal 2025 diyakini menjadi pemicu tagar #KaburAjaDulu dan menjadi viral di kalangan masyarakat sipil termasuk generasi muda. Rakyat dan generasi muda sudah resah dengan keadaan negeri yang sudah mulai tidak baik-baik saja akibat kebijakan-kebijakan kontroversial yang membungkus kepentingan tertentu dari para pemangku jabatan dan pemegang kekuasaan. Terlebih, mereka tidak terbuka terhadap jeritan masyarakat dan kritik atas kebijakan yang dibuatnya. Alih-alih menjadi sarana mewujudkan nilai kemanusiaan di dalam negara, yang terjadi adalah menjadi senjata ampuh demi kelanggengan kekuasaan dan pencapaian keuntungan dan kepentingan segelintir orang tertentu.

Generasi muda, sadar tidak sadar, telah menjadi budak atas kepentingan politis para penguasa. Mereka yang seharusnya berkembang sesuai karakteristik psikologis pada rentang usianya, malah dibikin mandek oleh sistem pendidikan yang sudah sejak lama sarat akan unsur politisasi. Otonomi mereka atas akal budi sendiri tergerus oleh otoritas politik yang melalui kebijakan kontroversial memaksa mereka untuk mengikuti apa kehendak para pemegang otoritas. Apa yang dicita-citakan oleh berbagai gagasan filsafat era Pencerahan tidak mendapat tempatnya di negeri kita ini. Akal budi manusia telah disetir oleh kepentingan eksternal sehingga manusia tidak lagi memiliki otonomi baik terhadap hidupnya maupun pada perkembangan akal budinya.

Tentu hal inilah yang mendorong masyarakat terutama kalangan generasi muda untuk kabur ke luar negeri

dengan beranggapan bahwa mereka akan berkembang dan memiliki kehidupan yang lebih baik di luar negeri ketimbang berada di dalam negeri yang keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Namun, jika fenomena kabur ini dianggap masalah sepele, maka keadaan akan bertambah kacau ketika negara mengalami krisis generasi muda. Sebab, generasi muda dianggap sebagai tonggak pembangunan bangsa dan negara. Maka, perlu adanya upaya transformasi yang dilakukan karena bersuara saja belum tentu cukup untuk memperbaiki keadaan. Namun, tentunya ketika hendak ingin mentransformasi keadaan (dalam lingkup yang besar) maka perlulah kita memulainya dengan transformasi diri kita, yaitu transformasi kesadaran dan mentalitas kita sebagai manusia dalam kodratnya. Jika kita berhasil memulainya dalam lingkup kecil yaitu dari dalam diri kita, maka kita pun akan dapat bergerak ke hal-hal yang besar; yang ada di luar diri kita seperti situasi dan keadaan lingkungan sosial dan negara kita di saat ini.

Referensi

- Ajhuri, K. F. 2019. Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Aji, W. T. 2025. *Tagar # KaburAjaDulu : Sinyal Krisis Atas Kondisi Bangsa Indonesia*. February. 1-17.
- Bagus, L. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Bakker, A. 2000. *Antropologi Metaphysical*. Yogyakarta: Kanisius.
- Centry, J. H. & Campbell, M. (ed.) 2002. *A Reference for Professionals Developing Adolescents*. Washington DC: American Psychological Association.
- Descartes, R. 2003. *Discourse on Method and Meditations* (terj. E. S. Haldane & G. R. T. Ross). New York: Dover Publications, Inc..
- Fromm, E. 2020. *Man for Himself: Manusia untuk Dirinya Sendiri* (terj. S. M. Nur). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Garvey, J. 2010. *20 Karya Terbesar Filsafat* (terj. C. B. Mulyatno). Yogyakarta: Kanisius.
- Ginsler, H.J., Spurgin, E. W., & Swindal, J. C. (ed.) 2004. *Ethics: Contemporary Readings*. New York: Routledge.
- Gombrich, E. H. 2010. *Sejarah Dunia Untuk Pembaca Muda* (terj. E. Soeprapto-Hastrich). Tangerang: Marjin Kiri.
- Ida, L. 2010. *Negara Mafia*. Yogyakarta: Galangpress.
- Jost, J. T. & Sidanius, J. (ed.) 2004. *Political Psychology: Key Readings*. New York: Taylor & Francis Book, Inc..
- Linrung, T. 2014. *Politik untuk Kemanusiaan*. Tangerang: Tali Writing & Publishing.
- Kusbiantoro, P. T. 2023. *Psikologi Pengenalan Diri*. Malang: Karmelindo.
- (n.n) 2025. *Teror Kepala Babi ke Jurnalis Tempo Serangan Berbahaya terhadap Kemerdekaan Pers*. <https://aji.or.id/informasi/teror-kepala-babi-ke-jurnalis-tempo-serangan-berbahaya-terhadap-kemerdekaan-pers>
- Priambodo, R. A., Aditia, N., Albab, M. U., Kusnanto, R., & Nugraha, D. M. 2025. *Jurnal Penelitian Nusantara Fenomena Perpindahan Warga Negara: Antara Nasionalis Dan Realistik Menulis* : *Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 26–29.
- Riyanto, A., Pandor, P., Pasi, G., & Adon, M. J. (ed.) 2025. *Apakah Berpikir: Sayap Filsafat Relasionalitas Liyan (Other)*. Jakarta: Obor.
- Riyanto, A. 2025. *Dekolonisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rokhim, F., Novianti, T., & Anggraeni, L. 2024. *Faktor-Faktor Pendorong Pengangguran Usia Muda di Indonesia (Driving Factors of Youth Unemployment In Indonesia)*. 73–89.
- Saeng, V. 2012. *Herbert Marcuse: Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*. Jakarta: Gramedia.
- Susetyo, B. 2013. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LKIS.
- Yusdiyanto 2016. MAKNA FILOSOFIS NILAI-NILAI SILA KE-EMPAT PANCASILA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA Philosophical Meaning Values Principles Fourth of Pancasila in the Democracy System of Indonesia. *Fiat Justitia Journal of Law*, 10(2), 221–412. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Zaenuddin, M. 2025. *Awal Mula Tren Tagar Kabur Aja Dulu Ramai Digunakan, Mengapa?*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/18/083000865/awal-mula-tren-tagar-kabur-aja-dulu-ramai-digunakan-mengapa?page=all>
- Zoraya, E., & Wulandari, M. D. 2020. Karakteristik Kaum Muda Pada Pasar Tenaga Kerja Dan Determinan Neet Di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 4(2), 12. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i2.144>